

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan Publik kini telah menjadi isu sentral dalam pembangunan di Indonesia. Perkembangannya pelayanan publik memang selalu aktual untuk diperbincangkan. Pada dasarnya memang manusia membutuhkan pelayanan, konsep pelayanan ini akan selalu berada pada kehidupan setiap manusia. Posisi masyarakat yang berubah menjadi warga negara membuat para penyedia pelayanan publik tidak hanya memosisikan masyarakat sebagai konsumen, melainkan lebih jauh masyarakat juga dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Peran serta masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan ini memungkinkan bagi penyedia layanan publik untuk lebih responsif. Hal utama yang menjadi indikator bahwa penyedia layanan publik telah responsif terhadap masyarakat adalah munculnya inovasi pelayanan. Konsep inovasi, belum berkembang secara maksimal pada sektor publik. Hal ini, dikarenakan kebanyakan organisasi sektor publik kurang tertantang, karena berada dalam iklim yang nonkompetitif, dan bahkan tidak merasa bermasalah dalam hal kelangsungan hidupnya. Maka, wajar jika konsep inovasi kurang berkembang dalam sektor publik. Namun demikian, perubahan yang terjadi dalam proses administrasi publik menuntut banyak hal lain turut berubah (Rina Mei Mirnasari, 2013)

Pelayanan yang berkualitas dan bermutu tinggi menjadi perhatian utama dari organisasi publik. Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama pemerintah adalah sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pengadaan jasa yang diperlukan masyarakat. Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan bagi kelangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan. Pemerintah dibentuk dengan demikian bukanlah untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat.

kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 1998) Disadari bahwa kondisi aparatur negara masih dihadapkan pada sistem manajemen pemerintahan yang belum efisien dan lemah yang antara lain menghasilkan kualitas pelayanan publik yang rendah dan terjadi berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengakibatkan tidak efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja aparatur, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat. Pelayanan publik yang banyak dikenal dengan sifat birokratis dan banyak mendapat keluhan dari masyarakat pelanggannya, antara lain disebabkan masih belum memperhatikan kepentingan masyarakat pengguna. Paradigma yang dipergunakan para pengelola pelayanan publik cenderung lebih bersifat direktif yang hanya memperhatikan/mengutamakan

kepentingan pimpinan organisasinya saja. Masyarakat sebagai pengguna seperti tidak memiliki kemampuan apapun wujud berkreasi, suka tidak suka, mau tidak mau, mereka harus tunduk kepada pengelolanya. Seharusnya, pelayanan publik dikelola dengan paradigma yang bersifat supportif dimana lebih memfokuskan diri kepada kepentingan masyarakatnya, pengelola pelayanan harus mampu bersikap menjadi pelayan yang sadar untuk melayani dan bukan dilayani. (Larasati, 2007:36).

Keterbukaan informasi, jika dikaitkan dengan aktivitas pelayanan, ikut mendorong masyarakat kian sadar tentang hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, harapan untuk bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik tersebut kini juga mulai digantungkan kepada organisasi pemerintahan. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat mengenai diskriminasi pelayanan. Sebagai contoh adanya masyarakat yang dipersulit ketika mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) di instansi pemerintah seperti dikenakan biaya ekstra untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat. Selain itu keluhan lain yang diungkapkan pengguna layanan yaitu adanya ketidakpastian waktu sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan. Ketidakpastian waktu dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Instansi pemerintah tersebut. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari Merdeka.com

Di Kabupaten Probolinggo Sendiri Pada Kecamatan Dringudan Desa Kedungdalem sebelum adanya Inovasi Pelayanan banyak menimbulkan citra yang kurang baik terhadap instansi tersebut dimana Sebelum adanya Inovasi pelayanan ini Proses pelayanan di Kecamatan Dringu dan Desa Kedungdalem Memakan waktu yang lama, Pemohon membutuhkan antrian di Kecamatan, Jika pejabat tidak berada di tempat berkas pelayanan tidak bisa ditandatangani serta ketepatan waktu pelayanan kurang jelas. (Data berdasarkan dari Proposal Inovasi Kecamatan Dringu)

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, merupakan kesempatan bagi Daerah Kabupaten/Kota untuk mengatur sendiri pembentukan, kedudukan, kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah dan kemampuan daerah sehingga dapat berbeda antara Daerah Kabupaten/Kota yang satu dengan yang lainnya. Daerah lebih leluasa dalam menentukan dan memberikan kewenangan kepada Kecamatan dalam rangka memenuhi tuntutan, keinginan dan kebutuhan masyarakat, terlebih lagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan banyak berkaitan langsung dengan pemberian pelayanan publik (Rusli Isa, 2009).

Kualitas pelayanan di Kecamatan diharapkan akan menjadi lebih baik setelah menjadi perangkat daerah sebab tujuan pemberian otonomi daerah dan keberadaan daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan dan penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien,

ekonomis dan demokratis. Secara sederhana kata pelayanan akibat adanya pelayan yang melayani. Kegiatan yang dilakukan pelayan tersebut dinamakan pelayanan. Dengan demikian ada dua istilah yang saling terkait, yaitu pelayanan dan melayani. Pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan. Pada organisasi publik/pemerintah keadaannya tidak jauh berbeda, bahwa kegiatan pelayanan yang terjadi juga akibat adanya interaksi masyarakat/publik dengan aparat pelayanan. (Moenir, 2000) mengartikan pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Sekelompok orang yang memberikan pelayanan tersebut adalah aparat birokrasi pemerintah. Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana tercipta hubungan yang dinamis antara pengguna maupun pemberi layanan, baik jasa, manusia. Pelayanan publik berkaitan erat dengan kemampuan, daya tanggap, ketepatan waktu, dan sarana prasarana yang tersedia. Apabila layanan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya jika layanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut tidak berkualitas. Baik buruknya kualitas layanan bukan berdasarkan sudut pandang atau persepsi penyedia

jasa/layanan melainkan berdasarkan pada persepsi konsumen dan aturan atau ketentuan tentang kualitas pelayanan.

Melihat teknologi dan dunia yang semakin maju, tentu menuntut segala aspek kehidupan untuk ikut bergerak menyamakan langkah, termasuk layanan publik. Perwujudan Kecamatan Dan Desa yang maju saja tidak begitu cukup karena Kecamatan dan Desa Memerlukan Teknologi seperti gawai yang harus smart dan tentunya untuk mengakses sebuah Aplikasi, Terutama Aplikasi pelayanan publik yang diciptakan oleh pemerintah guna untuk mempermudah suatu pelayanan sehingga menjadi lebih efektif cepat dan murah serta aman misalnya SIAK (Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan) pengurusan E-KTP pada masyarakat sebagai upaya mewujudkan dan meningkatkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam pelayanan publik terhadap masyarakat. yang sudah Banyak di terapkan di Indonesia salah satunya di Kecamatan Medan Baru ([researchgate.net](https://www.researchgate.net))

Di Jawa Timur Inovasi layanan juga ada yang namanya PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)PATEN tersebut adalah untuk mewujudkan kantor layanan di kecamatan sebagai pusat pelayanan dan simpul pelayanan bagi masyarakat, yang meliputi pelayanan bidang perizinan dan pelayanan bidang non perizinan dan PATEN juga merupakan penyelenggaraan sejumlah pelayanan kepada publik untuk dapat dituntaskan di tingkat kecamatan, yakni dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.PATEN sudah diterapkandiseluruhKecamatan di Jawatimur (infopublik.id).

Di Kabupaten Probolinggo sendiri Terutama Pada Kecamatan Dringu dan Kecamatan Sumberasih Juga ada Inovasi Layanan Cepat Administrasi Kecamatan (LAPAK) dimana Lapak ini menggunakan Aplikasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pelayanan administrasi Seperti Pembuatan KTP dan Kartu Keluarga Aplikasi ini berfungsi untuk meningkatkan pelayanan administrasi yang berkualitas cepat, singkat, aman, modern, akuntabel dan ini sangat menguntungkan bagi masyarakat. (surabaya.tribunnews.com)

Sebelumnya Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Dayang Erawati Djamrut (2015) dengan Judul “ Inovasi Pelayana Publik Di Kecamatan Sungai Kujang Kota Samarinda” dalam Pelayanan ini dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sungai Kujang Samarinda Menggunakan media sosial dalam Melakukan Pelayanan, melalui Jejaring sosial (Facebook, SMS, dan Telepon sebagai jalur penyampaian pelayanan Melalui jejaring sosial masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi secara mandiri dan gratis tanpa harus antri untuk bertemu petugas loket, serta menjadi media bagi masyarakat atau pengguna layanan untuk menyampaikan pengaduan. Masyarakat mendukung Jejaring Sosial, kekurangan dari penelitian ini adalah peneliti tidak mencantumkan adanya dampak negative dan positif dengan adanya pelayanan apakah pihak kecamatan memperhatikan adanya keamanan pelayanan yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga apakah masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang

diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. Sedangkan kelebihan dari pelayanan peneliti menjelaskan secara baik tentang inovasi yang menggunakan media sosial ini. (<https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>)

Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Citra Ayu Foni Andiyana dan Dra. Meirinawati, M.AP, (2016) dengan judul “Inovasi Layanan Administrasi 30 Detik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Kantor Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik” dalam penelitian ini dapat disimpulkan Inovasi Layanan Administrasi 30 Detik di Desa Pangkahkulon sudah berjalan cukup baik dan berkualitas karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Namun diluar aplikasi Inovasi Layanan Administrasi 30 Detik masih ditemukan kendala terkait Sumber Daya Manusia, bahwa masih terdapat beberapa aparatur desa yang kurang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang IT serta hanya beberapa orang saja yang dapat mengoperasikannya. Kekurangan dari penelitian ini adalah terkait sumber dana, minimnya dana yang diperuntukkan untuk pengembangan dan penyempurnaan inovasi tersebut diketahui anggaran dari desa tidak ada dan kelebihan dari penelitian ini peneliti menjelaskan secara detail inovasi pelayanan cepat selesai ini masyarakat hanya membutuhkan waktu sekitar 30 detik. (<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id>)

Penelitian terdahulu berikutnya yang dilakukan oleh Masna Wati dan Engla Despahari, Pada tahun 2018 dengan judul Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan di Kecamatan

Marangkayu Kutai Kartanegara lokasi penelitian pada Kecamatan Marangkayu Kutai Kartanegara dengan menggunakan penelitian Kualitatif dengan pengumpulan data observasi wawancara dan dokumentasi hasil dari penelitian ini adalah Sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan yang dibangun dapat mengelola dan melayani warga untuk pembuatan surat permohonan domisili, surat permohonan Kartu Keluarga (KK), surat permohonan KTP, surat permohonan pindah dan surat permohonan SKCK. Sistem ini juga mengelola data warga sehingga setiap pengelolaan surat selalu terhubung pada data base warga sehingga surat yang dikeluarkan bersesuaian dengan data warga di setiap kelurahan. Dengan adanya sistem ini, dapat mengurangi kesalahan pihak kelurahan dalam pembuatan surat karena format surat telah diatur oleh system serta membantu dalam pengarsipan yang tertata dengan baik. Kekurangan yang ada pada penelitian ini adalah peneliti tidak mencantumkan faktor pendukung dan penghambat terhadap penerapan Aplikasi inovasi ini, sedangkan kelebihan nya adalah peneliti menjelaskan secara detail tentang inovasi ini sesuai dengan indikator-indikator yang digunakan oleh peneliti serta tata cara penggunaan Aplikasi pelayanan tersebut. (<http://e-journals.unmul.ac.id>)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu sebagai referensi penulis, maka ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian penulis sebagai berikut. Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu diatas, persamaan penelitian tersebut dengan milik penulis yakni sama-sama meneliti tentang inovasi pelayanan publik yang berbasis teknologi dengan menggunakan

metode penelitian kualitatif. Sedangkan Perbedaan Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu diatas, perbedaan penelitian tersebut dengan milik penulis yakni pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu mengenai Evaluasi Inovasi pelayanan publik LAPAK TALI TANTRI yang ada di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dimana Inovasi tersebut Menggunakan Aplikasi dalam Melakukan Pelayanan Administrasi sehingga Masyarakat hanya perlu membawa berkas dan datang di kantor desa Saja.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik yaitu tertera pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 9 ayat (1) ditetapkan bahwa dalam rangka mempermudah pelayanan publik maka diselenggarakanlah sistem pelayanan terpadu. Pada Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Probolinggo. Serta juga dikeluarkannya Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Layanan Cepat Administrasi Kecamatan (LAPAK). Aplikasi LAPAK ini Mulai di Implementasikan Sejak November 2017 dengan 2 (dua) Kecamatan Sebagai Pilot Project yaitu Kecamatan Dringu Dengan LAPAK TALI TANTRI (Layanan Cepat Administrasi Kecamatan Tanpa Pungli Tanpa Antri) dan Kecamatan Sumberasih dengan LAPAK SMS (Layanan Cepat Administrasi Kecamatan Sepuluh Menit Selesai).

Kondisi sosial budaya serta tingkat Sumber Daya Manusia yang cukup tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kecamatan Dringu dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Tuntutan sebagian besar warga masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas cepat, mudah dan murah menjadi tantangan yang harus dipenuhi. Gambaran kondisi pelayanan beberapa waktu lalu sebelum adanya implementasi LAPAK cukup banyak mengalami kendala yang dikeluhkan warga masyarakat terutama dalam hal birokrasi. Pelayanan administrasi dari desa hingga kecamatan dilakukan secara berjenjang melalui beberapa meja pelayanan. Belum lagi jika petugas dan pejabat berwenang dalam birokrasi pengurusan administrasi tidak berada di tempat, maka warga pemohon harus menunggu atau kembali lagi pada hari berikutnya. Disamping itu masyarakat juga mulai kritis kualitas infrastruktur pelayanan, seperti ruang pelayanan, toilet, mushollah kotak pengaduan dan sebagainya (Proposal InovasiKecamatanDringu 2018) .

LAPAK TALI TANTRI merupakan sebuah Inovasi pelayanan dari Kecamatan Dringu LAPAK TALI TANTRI sendiri merupakan kepanjangan dari (Layanan Cepat Administrasi Kecamatan Tanpa Pungli Tanpa Antri) layanan ini berbasis Aplikasi, Aplikasi ini berfungsi untuk meningkatkan pelayanan administrasi yang berkualitas cepat, singkat, aman, modern, akuntabel dan menguntungkan bagi masyarakat, Masyarakat bisa mengurus atau melengkapi surat surat administratif cukup hadir ke kantor Desa dan tidak perlu hadir di Kantor Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 85 Tahun 2016 mengatur Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Probolinggo. Dimana kecamatan di Kabupaten Probolinggo dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Kecamatan, Kepala SubBagian, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah.

Menindak lanjuti peraturan tersebut Camat Dringu mengeluarkan Surat Keputusan Camat Nomor: 470/22/426.419/2019 Tentang SOP (*Standart Operasional Prosedure*) pelayanan Administrasi di Kecamatan Dringu. Inovasi LAPAK TALI TANTRI Menggunakan Aplikasi dalam Pelayanan, Masyarakat hanya perlu datang ke kantor desa setelahnya petugas pelayanan desa menggunakan aplikasi tersebut untuk disampaikan kekecamatan hingga selesai dan membutuhkan waktu sekitar 10 menit.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Petugas Pelayanan Di Kantor Desa Kedungdalem Kecamatan Dringu yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2020, Ibu Yuris Alkhoni, S.pd memaparkan bahwa Hanya 10 Menit sudah bisa jadi. Selam ada sinyal, Aplikasi LAPAK ini akan dapat berjalan

dengan baik dan berjalan secara efektif, Masyarakat hanya perlu datang ke Kantor Desa dan menyampaikan keperluan surat yang dibutuhkan. Surat akan di scan dan dimasukkan kedalam Aplikasi Nantinya akan ada petugas yang memantau Aplikasi ini, Jika memang Sudah lengkap, Berkas akan dikirimkan ke Kecamatan.

Dalam penelitian ini mengambil fokus kepada Desa yakni Desa Kedung Dalem dimana desa Kedung Dalem merupakan salah satu desa dari Kecamatan Dringu yang Melakukan Administrasi Pelayanan selain itu juga dikarenakan Desa Kedung Dalem mempunyai jarak dekat dengan Kecamatan Dringu untuk mengetahui apakah masyarakat Desa Kedungdalem dapat menerima dengan baik dan merasa puas dengan adanya inovasi layanan ini serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dari LAPAK TALI TANTRI ini, dan akan lebih memfokuskan Mengevaluasi LAPAK TALI TANTRI di Desa Kedung Dalem dalam aspek memberikan pelayanan terbaik bagi warga negara sebagai fungsi administrasinya dengan faktor-faktor yang ada di dalamnya seperti pelayanan umum, pemerintah yang transparan dan layanan online yang sudah berjalan dari tahun 2017.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja (Studi Pada Inovasi LAPAK TALI TANTRI Di Desa Kedung Dalem Kecamatan Dringu). “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Evaluasi Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 85 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja (Studi Pada Inovasi LAPAK TALI TANTRI Di Desa Kedung Dalem Kecamatan Dringu) ?
2. Apa Saja Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Evaluasi Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 85 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja (Studi Pada Inovasi LAPAK TALI TANTRI Di Desa Kedung Dalem Kecamatan Dringu) ?

C. Tujuan Penelitian

Pada sebuah Penelitian, seseorang peneliti harus menentukan tujuan dari penelitiannya, sesuai dengan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Evaluasi Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 85 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja (Studi Pada Inovasi LAPAK TALI TANTRI Di Desa Kedung Dalem Kecamatan Dringu).
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung Dan PenghambatE valuasi Peraturan Bupati probolinggo Nomor 85 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja

(Studi Pada Inovasi LAPAK TALI TANTRI Di Desa Kedung Dalem Kecamatan Dringu).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka mafaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- A. Bagi Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo: Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui Evaluasi dari Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja (Studi Pada Inovasi LAPAK TALI TANTRI Di Desa Kedung Dalem Kecamatan Dringu).
- B. Bagi Desa Kedung Dalem Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo: Penelitian ini diharapkan mengetahui Evaluasi dari Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja (Studi Pada Inovasi LAPAK TALI TANTRI Di Desa Kedung Dalem Kecamatan Dringu).
- C. Bagi Masyarakat: Penelitian ini dapat diharapkan masyarakat mempunyai pandangan yang baik terhadap sistem kebijakan yang ada di Kecamtan Dringu Khususnya Desa Kedung Dalem Kabupaten Pobolinggo dan Masyarakat bisa mengetahui adanya Inovasi LAPAK TALI TANTRI ini.
- D. Bagi Peneliti: Diharapkan Penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan dan penguasaan ilmu-ilmu yang pernah diperoleh oleh

peneliti selama mengikuti pendidikan di Program Studi Administrasi Publik Universitas Panca Marga Probolinggo.

2. Mafaat Teoritis

Supaya dapat bermanfaat dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademis khususnya administrasi publik. Selain itu dapat mempertajam mengembangkan teori-teori yang ada dalam dunia akademis Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga Probolinggo.

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih memahami proposal ini, maka penulis dapat dikelompokkan ke dalam beberapa sub bab dan menggunakan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian dan sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini menguraikantentang teori-teori yang melandasi dan berkaitan dengan kepentingan analisis studi anantara lain definisi Implementasi Kebijakan Publik dan Inovasi Pelayanan.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis data dan metode pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis

BAB IV : Pembahasan dan Analisis Data

Bab ini memuat tentang data dan informasi mengenai Desa kedung Dalem, Kecamatan Dringu. hasil analisis mengenai Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja (Studi Pada Inovasi LAPAK TALI TANTRI Di Desa Kedung Dalem Kecamatan Dringu).

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian di wilayah studi serta saran-saran.